BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Pidie Nomor 89 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Pidie;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonon Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 100);
18. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Pidie Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2018 Nomor 89) yang telah beberapa kali diubah dengan :

a. Peraturan Bupati Pidie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 6);
b. Peraturan Bupati Pidie Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 64);

diubah sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Bagan Akun Standar Terdiri dari :
   a. Bagan Akun Standar Neraca Bagian Aset Lancar dan Investasi;
   b. Bagan Akun Standar Neraca Bagian Aset Tetap dan Asset Lainnya;
   c. Bagan Akun Standar Neraca Bagian Hutang;
   d. Bagan Akun Standar Laporan Realisasi Anggaran Bagian Pendapatan LRA;
   e. Bagan Akun Standar Laporan Realisasi Anggaran Bagian Belanja;

f. Bagan Akun Standar Laporan Operasional Bagian Pendapatan LO;
g. Bagan Akun Standar Laporan Operasional Bagian Beban.

(2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 30 November 2023 M
16 Jumadil Awal 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 30 November 2023 M
16 Jumadil Awal 1445 H

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 34

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 34 Tahun 2023
Tanggal : 30 November 2023

BAGAN AKUN STANDAR NERACA BAGIAN

ASET LANCAR DAN INVESTASI

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
0	0	00	00	00	0000	Perubahan SAL
1						**ASET**
1	**1**					**ASET LANCAR**
1	1	01				Kas dan Setara Kas
1	1	01	01			Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01		Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01	0001	Kas di Kas Daerah
1	1	01	02			Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01	0001	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	03			Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01	0001	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	04			Kas di BLUD
1	1	01	04	01		Kas di BLUD
1	1	01	04	01	0001	Kas di BLUD
1	1	01	05			Kas Dana BOS
1	1	01	05	01		Kas Dana BOS
1	1	01	05	01	0001	Kas Dana BOS
1	1	01	06			Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01		Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01	0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	07			Kas Lainnya
1	1	01	07	01		Kas Lainnya
1	1	01	07	01	0001	Kas Lainnya
1	1	01	08			Setara Kas
1	1	01	08	01		Setara Kas
1	1	01	08	01	0001	Setara Kas
1	1	01	09			Kas Dana Desa
1	1	01	09	01		Kas Dana Desa
1	1	01	09	01	0001	Kas Dana Desa
1	1	02				Investasi Jangka Pendek
1	1	02	01			Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01		Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01	0001	Investasi dalam Saham
1	1	02	02			Investasi dalam Deposito
1	1	02	02	01		Deposito Jangka Pendek
1	1	02	02	01	0001	Deposito Jangka Pendek
1	1	02	03			Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01		Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01	0001	Investasi dalam SUN
1	1	02	04			Investasi dalam SBI

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	2	01	02	01	0001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	03			Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01		Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01	0001	Investasi dalam Obligasi
1	2	01	04			Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	01	04	01		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	2	01	04	01	0001	Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	2	01	04	02		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada PemerintahDaerah
1	2	01	04	02	0001	Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada PemerintahDaerah
1	2	01	05			Dana Bergulir
1	2	01	05	01		Dana Bergulir kepada Koperasi
1	2	01	05	01	0001	Dana Bergulir kepada Koperasi
1	2	01	05	02		Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	01	05	02	0001	Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	01	05	03		Dana Bergulir melalui BLUD
1	2	01	05	03	0001	Dana Bergulir melalui BLUD
1	**2**	**02**				**Investasi Jangka Panjang Permanen**
1	2	02	01			Penyertaan Modal
1	2	02	01	01		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	2	02	01	01	0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	2	02	01	02		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	2	02	01	02	0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	2	02	02			Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
1	2	02	02	01		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada PemerintahPusat
1	2	02	02	01	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
1	2	02	02	02		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada PemerintahDaerah Lainnya
1	2	02	02	02	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	2	02	02	03		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
1	2	02	02	03	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
1	2	02	02	04		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
1	2	02	02	04	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
1	2	02	02	05		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
1	2	02	02	05	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
1	2	02	02	06		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	2	02	02	06	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat

Pj. BUPATI PIDIE

WAHYUDI ADISISWANTO

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 34 Tahun 2023
Tanggal : 30 November 2023

BAGAN AKUN STANDAR NERACA

BAGIAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	**3**					**ASET TETAP**
1	3	01				Tanah
1	3	01	01			Tanah
1	3	01	01	01		Tanah Persil
1	3	01	01	01	0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	3	01	01	01	0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1	3	01	01	01	0003	Tanah untuk Bangunan Industri
1	3	01	01	01	0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
1	3	01	01	01	0005	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
1	3	01	01	01	0006	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
1	3	01	01	01	0007	Tanah Persil Lainnya
1	3	01	01	02		Tanah Non Persil
1	3	01	01	02	0001	Tanah Basah
1	3	01	01	02	0002	Tanah Kering
1	3	01	01	02	0003	Tanah Perkebunan
1	3	01	01	02	0004	Tanah Hutan
1	3	01	01	02	0005	Tanah Tandus
1	3	01	01	02	0006	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
1	3	01	01	02	0007	Tanah Pertanian
1	3	01	01	02	0008	Tanah Pertambangan
1	3	01	01	02	0009	Tanah Non Persil Lainnya
1	3	01	01	03		Lapangan
1	3	01	01	03	0001	Tanah Lapangan Olahraga
1	3	01	01	03	0002	Tanah Lapangan Parkir
1	3	01	01	03	0003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang
1	3	01	01	03	0004	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1	3	01	01	03	0005	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1	3	01	01	03	0006	Tanah Lapangan Terbang
1	3	01	01	03	0007	Tanah untuk Jalan
1	3	01	01	03	0008	Tanah untuk Bangunan Air
1	3	01	01	03	0009	Tanah untuk Bangunan Instalasi
1	3	01	01	03	0010	Tanah untuk Bangunan Jaringan
1	3	01	01	03	0011	Tanah untuk Bangunan Bersejarah
1	3	01	01	03	0012	Tanah untuk Makam
1	3	01	01	03	0013	Tanah untuk Taman
1	3	01	01	03	0014	Tanah untuk Latihan
1	3	01	01	03	0015	Tanah Daerah Pertahanan
1	3	01	01	03	0016	Tanah Lapangan PBB
1	3	01	01	03	0017	Tanah Kampung
1	3	01	01	03	0018	*Emplasment*
1	3	01	01	03	0019	Lapangan Lainnya
1	3	02				Peralatan dan Mesin
1	3	02	01			Alat Besar
1	3	02	01	01		Alat Besar Darat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	5	04	01			Aset Lain-lain
1	5	04	01	01		Aset Lain-lain
1	5	04	01	01	0001	Aset Rusak Berat/Usang
1	5	04	01	01	0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam OperasionalPemerintah
1	5	05				Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01	0001	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi danFrenchise
1	5	05	01	01	0002	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
1	5	05	01	01	0003	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
1	5	05	01	01	0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-
1	5	05	01	01	0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian
1	5	06				Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01			Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01	01		Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	06	01	01	0001	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa
1	5	05	01	01	0002	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
1	5	05	01	01	0003	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-BangunGuna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
1	5	05	01	01	0004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
1	5	07	01	01		Kas yang dibatasi penggunaaannya
1	5	07	01	01	0001	Kas yang dibatasi penggunaaannya

Pj. BUPATI PIDIE

WAHYUDI ADISISWANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 34 Tahun 2023
Tanggal : 30 November 2023

BAGAN AKUN STANDAR

NERACA BAGIAN HUTANG DAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2						**KEWAJIBAN**
2	**1**					**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
2	1	01				Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2	1	01	01			Utang Taspen
2	1	01	01	01		Utang Taspen
2	1	01	01	01	0001	Utang Taspen
2	1	01	02			Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01		Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	03			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01		Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	04			Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01		Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	05			Utang PPh Pusat
2	1	01	05	01		Utang PPh 21
2	1	01	05	01	0001	Utang PPh 21
2	1	01	05	02		Utang PPh 22
2	1	01	05	02	0001	Utang PPh 22
2	1	01	05	03		Utang PPh 23
2	1	01	05	03	0001	Utang PPh 23
2	1	01	05	04		Utang PPh 25
2	1	01	05	04	0001	Utang PPh 25
2	1	01	06			Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01		Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01	0001	Utang PPN Pusat
2	1	01	07			Utang Taperum
2	1	01	07	01		Utang Taperum
2	1	01	07	01	0001	Utang Taperum
2	1	01	08			Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01		Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01	0001	Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	02				Utang Bunga
2	1	02	01			Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
2	1	02	01	01		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- JangkaMenengah
2	1	02	01	01	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- JangkaMenengah
2	1	02	01	02		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
2	1	02	01	02	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- JangkaPanjang
2	1	02	01	03		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-JangkaMenengah
2	1	02	01	03	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-JangkaMenengah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	**2**	**04**	**01**	**01**	**0001**	Obligasi Daerah
3						**EKUITAS**
3	**1**					**EKUITAS**
3	1	01				Ekuitas
3	1	01	01			Ekuitas
3	1	01	01	01		Ekuitas
3	1	01	01	01	0001	Ekuitas
3	1	01	02			Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01		Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01	0001	Surplus/Defisit-LO
3	1	02				Ekuitas SAL
3	1	02	01			Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01		Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01	0001	Estimasi Pendapatan
3	1	02	02			Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01		Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01	0001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	03			Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01		Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01	0001	Apropriasi Belanja
3	1	02	04			Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01	0001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	05			Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01		Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01	0001	Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	06			Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01		Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01	0001	Surplus/Defisit-LRA
3	1	03				Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
3	1	03	01			RK PPKD
3	1	03	01	01		RK PPKD
3	1	03	01	01	0001	RK PPKD
3	1	04				Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
3	1	04	01			Koreksi Nilai
3	1	04	01	01		Koreksi Nilai
3	1	04	01	01	0001	Koreksi Nilai

Pj. BUPATI PIDIE

WAHYUDI ADISISWANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 34 Tahun 2023
Tanggal : 30 November 2023

BAGAN AKUN STANDAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN PENDAPATAN-LRA
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4						**PENDAPATAN DAERAH**
4	**1**					**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**
4	1	01				Pajak Daerah
4	1	01	06			Pajak Hotel
4	1	01	06	01		Pajak Hotel
4	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel
4	1	01	06	02		Pajak Motel
4	1	01	06	02	0001	Pajak Motel
4	1	01	06	03		Pajak Losmen
4	1	01	06	03	0001	Pajak Losmen
4	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	01	06	04	0001	Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata
4	1	01	06	05	0001	Pajak Wisma Pariwisata
4	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan
4	1	01	06	06	0001	Pajak Pesanggrahan
4	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	01	06	07	0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	01	06	08	0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	01	07			Pajak Restoran
4	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	01	07	03	0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	01	07	04	0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya
4	1	01	07	06	0001	Pajak Bar dan Sejenisnya
4	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	01	08			Pajak Hiburan
4	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film
4	1	01	08	01	0001	Pajak Tontonan Film
4	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
4	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	3	03	01	02	0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, danOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia
4	3	03	01	02	0006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan padaPartai Politik
4	3	03	01	03		Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
4	3	03	01	03	0001	Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment
4	3	03	02			Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	3	03	02	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	3	03	02	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pj. BUPATI PIDIE

WAHYUDI ADISISWANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 34 Tahun 2023
Tanggal : 30 November 2023

BAGAN AKUN STANDAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5						**BELANJA DAERAH**
5	**1**					**BELANJA OPERASI**
5	**1**	**01**				**Belanja Pegawai**
5	**1**	**01**	**01**			**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**
5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN
5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS
5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK
5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS
5	1	01	01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS
5	1	01	01	03	0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK
5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS
5	1	01	01	04	0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK
5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
5	1	01	01	05	0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK
5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS
5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK
5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS
5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK
5	1	01	01	09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
5	1	01	01	09	0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
5	1	01	01	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
5	1	01	01	10	0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
5	1	01	01	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
5	1	01	01	11	0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK
5	1	01	01	12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan RakyatASN
5	1	01	01	12	0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan RakyatPNS
5	1	01	01	12	0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan RakyatPPPK
5	1	01	01	13		Belanja Jaminan Hari Tua ASN

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	2	04	03	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	2	04	03	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	2	04	04			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	04	04	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	04	04	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	04	04	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepadaBUMN
6	2	04	04	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
6	2	04	05			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	04	05	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	04	05	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	04	05	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi
6	2	04	05	02	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi
6	2	04	06			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	04	06	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	04	06	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	04	06	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	2	04	06	02	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	2	04	07			Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
6	2	04	07	01		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
6	2	04	07	01	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
6	2	05				Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan KetentuanPeraturan Perundang- Undangan
6	2	05	01			Pinjaman melalui BLUD
6	2	05	01	01		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	2	05	01	01	0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	2	05	01	02		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	2	05	01	02	0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	2	05	01	03		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
6	2	05	01	03	0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang

PJ. BUPATI PIDIE

WAHYUDI ADISISWANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 34 Tahun 2023
Tanggal : 30 November 2023

BAGAN AKUN STANDAR
LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN PENDAPATAN-LO
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7						**PENDAPATAN DAERAH-LO**
7	**1**					**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**
7	**1**	**01**				**Pajak Daerah-LO**
7	**1**	**01**	**06**			**Pajak Hotel-LO**
7	1	01	06	01		Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	02		Pajak Motel-LO
7	1	01	06	02	0001	Pajak Motel-LO
7	1	01	06	03		Pajak Losmen-LO
7	1	01	06	03	0001	Pajak Losmen-LO
7	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	01	06	04	0001	Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	01	06	05	0001	Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	01	06	06	0001	Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	06	07	0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10(Sepuluh)–LO
7	1	01	06	08	0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10(Sepuluh)–LO
7	**1**	**01**	**07**			**Pajak Restoran–LO**
7	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	03	0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	04	0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya–LO
7	1	01	07	06	0001	Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	**1**	**01**	**08**			**Pajak Hiburan-LO**
7	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film–LO
7	1	01	08	01	0001	Pajak Tontonan Film–LO
7	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO
7	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO
7	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	03	0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan
7	1	01	08	04		Pajak Pameran–LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						(LKB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	03	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank(LKB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang- LO
7	4	02	02	04	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank(LKB)-BUMD-Jangka Panjang- LO
7	4	02	02	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank(LKB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	05	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank(LKB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank(LKB)-Swasta-Jangka Panjang- LO
7	4	02	02	06	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank(LKB)-Swasta-Jangka Panjang- LO
7	4	02	03			Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan BukanBank (LKBB)-LO
7	4	02	03	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-JangkaMenengah-LO
7	4	02	03	01	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-JangkaMenengah-LO
7	4	02	03	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-JangkaPanjang-LO
7	4	02	03	02	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-JangkaPanjang-LO
7	4	02	03	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	03	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-JangkaMenengah-LO
7	4	02	03	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	04	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-JangkaPanjang-LO
7	4	02	03	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-JangkaMenengah-LO
7	4	02	03	05	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-JangkaMenengah-LO
7	4	02	03	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-JangkaPanjang-LO
7	4	02	03	06	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-JangkaPanjang-LO
7	**4**	**02**	**04**			**Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO**
7	4	02	04	01		Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	02	04	01	0001	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi–LO
7	4	03				Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
7	4	03	01			Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
7	4	03	01	01		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
7	4	03	01	01	0001	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
7	4	03	02			Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek
7	4	03	02	01		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek
7	4	03	02	01	0001	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek
7	5					PENDAPATAN LUAR BIASA-LO
7	5	01				Pendapatan Luar Biasa-LO
7	5	01	01			Pendapatan Luar Biasa-LO
7	5	01	01	01		Pendapatan Luar Biasa-LO
7	5	01	01	01	0001	Pendapatan Luar Biasa-LO

Pj. BUPATI PIDIE

WAHYUDI ADISISWANTO

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 34 Tahun 2023
Tanggal : 30 November 2023

BAGAN AKUN STANDAR
LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN BEBAN
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	RincianObjek	Sub Rincian Objek	UraianAkun
8						**BEBAN DAERAH**
8	**1**					**BEBAN OPERASI**
8	**1**	**01**				**Beban Pegawai**
8	**1**	**01**	**01**			**Beban Gaji dan Tunjangan ASN**
8	1	01	01	01		Beban Gaji Pokok ASN
8	1	01	01	01	0001	Beban Gaji Pokok PNS
8	1	01	01	01	0002	Beban Gaji Pokok PPPK
8	1	01	01	02		Beban Tunjangan Keluarga ASN
8	1	01	01	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS
8	1	01	01	02	0002	Beban Tunjangan KeluargaPPPK
8	1	01	01	03		Beban Tunjangan Jabatan ASN
8	1	01	01	03	0001	Beban Tunjangan JabatanPNS
8	1	01	01	03	0002	Beban Tunjangan JabatanPPPK
8	1	01	01	04		Beban Tunjangan Fungsional ASN
8	1	01	01	04	0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS
8	1	01	01	04	0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK
8	1	01	01	05		Beban Tunjangan Fungsional UmumASN
8	1	01	01	05	0001	Beban Tunjangan Fungsional UmumPNS
8	1	01	01	05	0002	Beban Tunjangan Fungsional UmumPPPK
8	1	01	01	06		Beban Tunjangan BerasASN
8	1	01	01	06	0001	Beban Tunjangan BerasPNS
8	1	01	01	06	0002	Beban Tunjangan BerasPPPK
8	1	01	01	07		Beban Tunjangan PPh/TunjanganKhususASN
8	1	01	01	07	0001	Beban Tunjangan PPh/TunjanganKhususPNS
8	1	01	01	07	0002	Beban Tunjangan PPh/TunjanganKhususPPPK
8	1	01	01	08		BebanPembulatanGajiASN
8	1	01	01	08	0001	BebanPembulatanGajiPNS
8	1	01	01	08	0002	BebanPembulatanGajiPPPK
8	1	01	01	09		Beban Iuran JaminanKesehatanASN
8	1	01	01	09	0001	Beban Iuran JaminanKesehatanPNS
8	1	01	01	09	0002	Beban Iuran Jaminan KesehatanPPPK
8	1	01	01	10		Beban Iuran Jaminan KecelakaanKerjaASN
8	1	01	01	10	0001	Beban Iuran Jaminan KecelakaanKerjaPNS
8	1	01	01	10	0002	Beban Iuran Jaminan KecelakaanKerjaPPPK
8	1	01	01	11		Beban Iuran JaminanKematianASN
8	1	01	01	11	0001	Beban Iuran JaminanKematianPNS
8	1	01	01	11	0002	Beban Iuran JaminanKematianPPPK
8	1	01	01	12		Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan RakyatASN
8	1	01	01	12	0001	BebanIuranSimpananPesertaTabunganPerumahanRakyatPNS
8	1	01	01	12	0002	BebanIuranSimpananPesertaTabunganPerumahanRakyatPPPK
8	1	01	01	13		Beban Jaminan Hari Tua ASN

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	RincianObjek	Sub Rincian Objek	UraianAkun
						Panjang-LO
8	3	02	03	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMNJangka Panjang-LO
8	3	02	03	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMDJangka Menengah-LO
8	3	02	03	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMDJangka Menengah-LO
8	3	02	03	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMDJangka Panjang-LO
8	3	02	03	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMDJangka Panjang-LO
8	3	02	03	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	3	02	03	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	3	03				Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	03	01			Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	03	01	01		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	03	01	01	0001	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	03	02			Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
8	3	03	02	01		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
8	3	03	02	01	0001	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
8	4					BEBAN LUAR BIASA
8	4	01				Beban Luar Biasa
8	4	01	01			Beban Tidak Terduga
8	4	01	01	01		Beban Tidak Terduga
8	4	01	01	01	0001	Beban Tidak Terduga
8	4	01	02			Beban Luar Biasa Lainnya
8	4	01	02	01		Beban Luar Biasa Lainnya
8	4	01	02	01	0001	Beban Luar Biasa Lainnya

PJ. BUPATI PIDIE

WAHYUDI ADISISWANTO